

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi secara makro adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi disamping dua tujuan lainnya yaitu pemerataan dan stabilitas. Indikator ini penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, karena dapat memberikan gambaran makro atas kebijakan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.”¹⁾ Manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

¹⁾ Sadono Sukirno, **Ekonomi Pembangunan**: Edisi Kedua, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 9.

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun pada tahun 2007 adalah 5,31% dan pada tahun 2012 adalah 6,06%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi periode 2007-2012 (%)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007	5,31
2008	4,73
2009	4,92
2010	5,12
2011	5,81
2012	6,06

Sumber : BPS Simalungun dalam angka 2006-2013

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memegang penting dalam sebuah perekonomian modern. Pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit ekonomi lainnya seperti rumah tangga dan perusahaan. Bagi negara sedang berkembang campur tangan pemerintah relatif besar sehingga peranan pemerintah dalam perekonomian juga relatif besar. Pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karna pengeluaran dapat menciptakan berbagai prasaranayang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong

produksi domestik atau Produk Domestik Bruto (PDB), sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.

Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun sebagaimana pemerintah daerah lainnya di wilayah Indonesia, terus berupaya untuk meningkatkan pengeluaran pemerintahannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah (daerah), khususnya di bidang pembangunan, diharapkan turut meningkatkan perputaran roda perekonomian daerah bersangkutan, karena bidang pembangunan membutuhkan tenaga kerja dan barang modal selama prosesnya. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tahun 2007 sebesar Rp.849.126.911 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.408.013.222. Pengeluaran pemerintah di Kabupaten Simalungun setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2

Pengeluaran Pemerintah periode 2007-2012 (miliar rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2007	849.126.911
2008	964.307.996
2009	981.198.872
2010	1.018.775.568
2011	1.122.766.293
2012	1.408.013.222

Sumber : BPS simalungun dalam angka 2006-2013

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan penerapan sistem penganggaran terpadu yang meleburkan anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran. Penggabungan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan berupa gaji, pemeliharaan, perjalan dinas, dan belanja rutin.

Anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas dasar anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi dan penumpukkan serta penyimpangan anggaran. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaran pemerintah membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) sebagaimana banyak dilakukan di negara maju.

Pertumbuhan pengeluaran pemerintah dari setiap tahunnya tidak terlepas dari faktor pendapatan daerah yang didapat seperti pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Semakin tingginya pendapatan yang didapat oleh sebuah daerah, maka pemerintah daerah setempat juga akan berusaha meningkatkan besaran anggaran pengeluaran pemerintah, baik untuk belanja rutin maupun pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Namun di sisi lain yang terjadi pada beberapa pemerintah daerah, terkadang pelaksanaan program pengeluaran (belanja) masih sering berjalan lambat dari target yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga menyebabkan target pertumbuhan ekonomi dapat terhambat pencapaiannya.

Faktor lain yang mempengaruhi output suatu daerah adalah tenaga kerja memberikan peran yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Kenaikan jumlah penduduk dari waktu

ke waktu mampu menjadi pendorong dan penghambat pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan besarnya jumlah tenaga kerja. Hal ini akan membuat kenaikan dalam jumlah barang yang diproduksi. Tetapi pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi jika penambahan jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang tidak dapat diserap kedalam lapangan pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tulisan dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Apakah pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun ?
2. Apakah tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

1. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman penulis dalam meneliti.
2. Bagi penulis, merupakan latihan dan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi (GDP potensial) sepanjang waktu. Peningkatan output potensial terjadi jika terdapat kenaikan dalam sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia, atau modal, atau jika terdapat kemajuan teknologi. Dua ukuran yang paling sering digunakan dalam pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan GDP riil dan peningkatan output per kapita. Dari kedua ukuran ini, peningkatan output per kapita lebih mempunyai arti karena dapat mengindikasikan bahwa tersedia lebih banyak barang dan jasa per orang yang menggambarkan kenaikan standar kehidupan dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Pendapatan daerah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) yang didayagunakan di daerah tersebut. Pendapatan daerah dapat menggambarkan kemakmuran di daerah tersebut. Selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah

yang tercipta di daerah tersebut, kemakmuran suatu daerah juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar daerah atau mendapat aliran dana dari luar daerah.

“Menurut Boediono (dalam Robinson Tarigan) mengemukakan bahwa: "Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang." Jadi, persentase pertambahan *output* itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.”²⁾

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengaitkan dan menghitung persentase pertambahan tingkat pendapatan nasional dari satu periode ke periode berikutnya. Angka pertumbuhan ekonomi umumnya dalam bentuk persentase dan bernilai positif, tetapi mungkin juga bernilai negatif. Pertumbuhan ekonomi yang negatif disebabkan adanya penurunan yang lebih besar dari pendapatan nasional tahun berikutnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

2.1.2 Komponen Utama Pertumbuhan Ekonomi

Dalam proses pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan yang naik dan turun merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut.

Menurut pandangan para ekonom klasik (Smith, Ricardo, Malthus, dan Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Solow dan Swan), pada dasarnya ada empat faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok

²⁾ Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, **Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi**, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Medan : Bumi Aksara, 2007, hal 46.

barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam dan (4) tingkat teknologi yang digunakan.

Jumlah penduduk secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Sebenarnya, dampak positif dan negatifnya pertambahan penduduk sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Penduduk dianggap memberikan sumbangan yang positif kepada pembangunan terutama karena:

- a. Perkembangan penduduk akan memperluas pasar.
- b. Perbaikan dalam kemahiran dan mutunya dapat menciptakan berbagai akibat yang positif kepada pembangunan.
- c. Penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur yang penting dalam menciptakan pembentukan modal.

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Dalam hal ini, masyarakat melakukan seluruh kegiatannya pada saat ini tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsinya yang mendesak. Tetapi masyarakat mengarahkan sebagian yang ada padanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya.

2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Sumber Daya Alam
2. Akumulasi Modal
3. Organisasi
4. Kemampuan Teknologi
5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Luas tanah dan kekayaan alam suatu negara adalah tetap. Tanah dalam ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Sumber daya alam yang melimpah harus dapat dimanfaatkan secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber daya dapat dipergunakan dalam jangka waktu lebih lama. Jadi, sumber daya harus dapat dikembangkan melalui perbaikan teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan yang ada.

Lewis mengemukakan bahwa "Nilai suatu sumber daya alam tergantung pada kegunaannya, dan kegunaannya senantiasa berubah sepanjang waktu karena perubahan dalam selera, perubahan dalam teknik atau penemuan baru."³⁾ Jadi melalui pemanfaatan sepenuhnya terhadap sumber daya alam, maka setiap daerah atau wilayah harus dapat mengembangkan dirinya sendiri secara ekonomis ketika terjadi perubahan-perubahan seperti itu.

³⁾ M. L Jhingan, **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, Edisi Keenambelas, Terjemahan D. Guritno, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal.68.

Perubahan tingkat teknologi dianggap sebagai faktor yang penting dalam proses penumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, perubahan tingkat teknologi atau kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian atau membangun rumah.

2.1.4 Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi sebagai salah satu komponen penting dari Agregat Demand (AD), AD merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) disemua sektor-sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan dipasar. Dengan semakin berkembangnya pasar yang berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja, dan pendapatan didalam negeri semakin meningkat dan seterusnya, maka akan terciptalah pertumbuhan ekonomi.

2.2 Pengeluaran Pemerintah

2.2.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan terutama untuk kepentingan masyarakat. “Berbeda dengan rumah tangga, yang membeli barang untuk kebutuhannya, pemerintah membeli barang terutama untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran

untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pembelanjaan untuk mengembangkan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Pembelian pemerintah ke atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan yang utama: konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk kedalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian ke atas pembelian barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi. Memberikan beasiswa, bantuan untuk korban banjir, dan subsidi-subsidi pemerintah tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah ke atas produk nasional karena pengeluaran itu bukanlah untuk membeli barang dan jasa.”⁴⁾

Pengeluaran konsumsi pemerintah di Indonesia tercermin dalam pengeluaran rutin, sedangkan pengeluaran investasi pemerintah tercermin dalam pengeluaran pembangunan. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada beberapa faktor.

2.2.2 Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

“Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjutan.”⁵⁾

Tahap Awal :

⁴⁾ Sadono Sukirno, **Makroekonomi Teori Pengantar**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua Puluh Dua, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hal 38.

⁵⁾ Dr.Guritno Mangkoesobroto M.Ec, **Ekonomi Publik**, Edisi Ketiga, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, 1999, hal. 170.

Pada tahap perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti, pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Tahap Menengah :

Investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

Tahap Lanjut :

Pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

2.2.3 Teori Mikro

“Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain”.⁶⁾

Perkembangan pengeluaran pemerintah tergantung pada :

⁶⁾ **Ibid**, hal 177

1. Permintaan barang publik antara lain karena jumlah penduduk, pendapatan dan gaya hidup
2. Pola kegiatan pemerintah dalam proses produksi
3. Kualitas barang publik yang dihasilkan
4. Harga-harga faktor produksi dipasar.

Meningkatnya pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun menggambarkan kegiatan pemerintah semakin meningkat. Dengan mengalokasikan dana secara tepat maka efisiensi pengeluaran pemerintah dapat ditingkatkan sehingga produksi nasional pun diharapkan meningkat.

2.3 Tenaga Kerja

Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Di samping itu, pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah dan makin kompleksnya kebutuhan.

Menurut Badan Pusat Statistik “Tenaga kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan atau kegiatan lain”.⁷⁾ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. “Tenaga kerja adalah penduduk

⁷⁾ BPS Sumatera Utara dalam angka

yang berada dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya yang tergolong usia kerja adalah usia 15-64 tahun. Dalam tenaga kerja sudah termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.”⁸⁾

Pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk dapat dikatakan sebagai faktor positif yang akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Namun pertumbuhan tenaga kerja juga dapat memberikan dampak yang negatif. Hal ini akan terjadi bila sistem perekonomian daerah tersebut tidak mampu menyerap secara produktif peningkatan tenaga kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dengan tenaga kerja. Semakin besar jumlah penduduk dan TPAK-nya maka semakin besar pula jumlah angkatan kerja. TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis, sosial dan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK adalah : umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal (kota/desa), pendapatan dan agama.

2.3.1 Teori tentang Tenaga Kerja

a. Adam Smith (1729-1790)

Dalam teorinya Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Alasannya adalah bahwa alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya, jadi alam yang tersedia tersebut akan lebih bermanfaat bagi kehidupan apabila sudah dikelola.

Smith juga melihat bahwa alokasi SDM yang efektif adalah awal pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi

⁸⁾ Elvis F. Purba, Juliana L.Tobing, Dame Esther Hutabarat, **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2012, hal.57.

tetap tumbuh. Dengan kata lain, alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu (necessary conditional) bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Lewis (1959)

Lewis menyebutkan bahwa kelebihan pekerja bukan merupakan suatu masalah melainkan merupakan suatu kesempatan. Kelebihan pekerja pada suatu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan produksi dan penyediaan kerja disektor lain. Ada dua sektor didalam perekonomian, yaitu subsektor terbelakang dan kapasitas modern. Pada sektor sub sektor terbelakang, tidak hanya terdiri dari sektor pertanian tetapi juga terdiri dari sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer Koran. Pekerja di sektor sub sektor terbelakang mayoritas berada di wilayah pedesaan. Sektor subsisten terbelakang memiliki kelebihan penawaran kerja dan tingkat upah yang relative rendah dari pada sector kapasitas modern. Lebih rendahnya tingkat upah pekerja di pedesaan akan mendorong pengusaha di wilayah perkotaan untuk merekrut pekerja dari pedesaan dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsung proses industrialisasi, kelebihan penawaran kerja disektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan diserapnya kelebihan pekerja disektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan adanya asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten terbelakang sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak.

2.3.2 Hubungan Antara Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jadi semakin besar jumlah tenaga kerja berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif sehingga akan meningkatkan produktivitas dan akan memacu pertumbuhan ekonomi. Teori klasik tidak memasukkan tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena para ekonom di era tersebut lebih menekankan pada aspek mobilitas modal (K) dalam jangka panjang, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tergantung pada akumulasi modal (tabungan dan investasi), sedangkan teori neoklasik menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi selain modal dan teknologi.

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakeimbangan dalam penyebaran penduduk antara daerah yang mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral akan menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian nasional.

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi lain seperti bahan mentah, tanah, air dan sebagainya, karena manusialah yang menggerakkan seluruh sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang bekerja, sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain. Tiga golongan yang disebut pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga, walaupun tidak sedang bekerja mereka dianggap secara fisik mampu dan

sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya batas umur, dimana tiap-tiap negara memberi batasan umur yang berbeda.

Tidak semua angkatan kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, tetapi hanya oleh mereka yang bekerja. Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu struktur umur penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dalam suatu negara atau daerah pada suatu waktu tertentu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja. Perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk dalam usia kerja ini disebut tingkat partisipasi angkatan kerja.

Kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dapat menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi dengan pengertian bahwa tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga sebagai pasar barang dan jasa. Dalam hal ini, kebutuhan tenaga kerja tergantung dari kesempatan kerja yang tersedia dalam suatu perekonomian.

Secara makro dapat dikatakan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja sangat terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

2.4 Penelitian Terdahulu

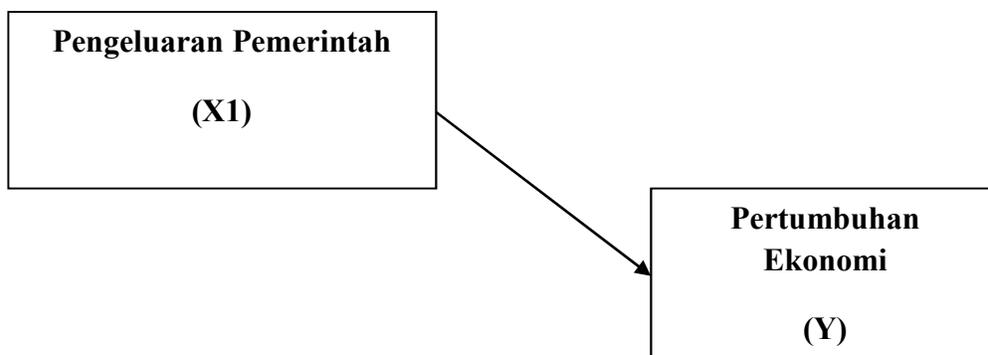
Bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah :

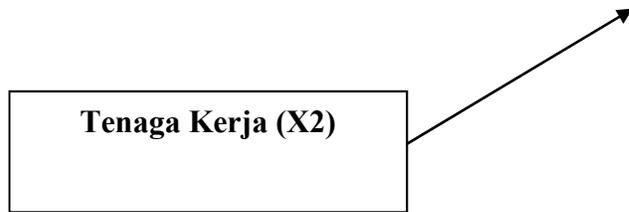
Penelitian yang dilakukan Deddy Rustiono (2008), dengan judul “ Analisis Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan model regresi log linier dengan metode kuadrat terkecil (OLS). Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($4,499 > 2,81$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak berarti secara bersama-sama variabel PMDN, PMA, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Mohamad Rizal Mubaroq, dkk (2013) yang berjudul “Pengaruh investasi pemerintah, tenaga kerja, dan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Indonesia tahun 2007-2010” menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan Fixed Effect Model dan White Cross Section menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel investasi pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan variabel kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.
2. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

BAB III

METODE PENELITIAN

“Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dengan mengikuti kaidah metode ilmiah untuk tujuan memecahkan satu persoalan praktis, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan mencari pengetahuan yang baru.”⁹⁾ Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

⁹⁾ Elvis F.Purba, Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Medan : Fakultas Ekonomi UHN, 2012, hal 10.

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simalungun untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data times series dari tahun 2001-2013. Data yang digunakan bersumber dari BPS Simalungun dalam Angka, serta jurnal dan hasil penelitian sebelumnya.

3.3 Metode Analisis Data

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun, maka dilakukan analisis dengan menggunakan model persamaan Ordinary Least Square (OLS). Fungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = f \{X_1, X_2\}$$

Kemudian dari fungsi tersebut ditransformasikan kedalam model persamaan ekonometrika dengan spesifikasi model, yakni :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \mu_t, t = 1, 2, 3, \dots, N$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi(%)

X₁ = Pengeluaran Pemerintah (miliar rupiah)

X₂ = Tenaga Kerja (%)

β₀ = Intersep/Konstanta

β₁-β₂ =Koefisien Regresi Populasi

μ = Galat

n = Sampel

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Statistik

Pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini meliputi pengujian hipotesis secara parsial (uji-t), pengujian hipotesis secara serempak (uji-F), dan uji kebaikan-suai koefisien determinasi R^2

3.4.1.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (penerimaan daerah, angkatan kerja) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas (pertumbuhan ekonomi), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Pengeluaran pemerintah

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh

$H_1 : \beta_1 > 0$ artinya, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_{\hat{\beta}_1} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{s_{\hat{\beta}_1}}$$

$\hat{\beta}_1$: statistik

β_1 : parameter

$s_{\hat{\beta}_1}$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima, artinya pengeluaran pemerintah secara parsial

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Tenaga Kerja

$H_0 : \beta_2 = 0$ artinya, tenaga kerja tidak berpengaruh

$H_1 : \beta_2 > 0$ artinya, tenaga kerja berpengaruh positif

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_{\hat{\beta}_2} = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{s_{\hat{\beta}_2}}$$

$\hat{\beta}_2$: statistik

β_2 : parameter

$s_{\hat{\beta}_2}$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima, berarti tenaga kerja secara parsial berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

3.4.1.2 Uji Secara Simultan(Uji “F”)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variabel tidak bebas yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama atau tidak.

Adapun langkah-langkah pengujian uji F adalah sebagai berikut:

a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$, berarti variabel bebas secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

$H_1: \beta_i$ tidak semua 0, berarti variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel tidak bebas, ($i = 1, 2$).

b. Mencari nilai F hitung dan nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan besarnya α dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai, $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_1 diterima, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, bila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas.

3.4.1.3 Uji Keباikan Suai: Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang mengukur kebaikan suatu model persamaan regresi, apakah model tersebut sudah baik menjelaskan hubungan variabel bebas (X) dengan variabel tidak bebas (Y). Dalam mengukur kebaikan-suai dari suatu persamaan regresi, koefisien determinasi memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel Y yang dijelaskan oleh model regresi. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel tidak bebas amat terbatas. Nilai koefisien yang mendekati 1, berarti modelnya sudah sesuai untuk menjelaskan hubungan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas.

$$R^2 = \frac{JKR}{JKT} \times 100\%$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKT : Jumlah Kuadrat Total

3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Ada beberapa permasalahan yang akan terjadi dalam model regresi linier dimana secara statistik permasalahan tersebut dapat mengganggu model yang telah ditentukan, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang terbentuk. Untuk itu perlu melakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yang terdiri dari :

3.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang kuat diantara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran:

- a. Nilai-nilai koefisien tidak mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai $VIF < 10$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya $VIF > 10$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinieritas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$, maka kolinieritasnya adalah serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks $<$

0,95, maka kolinieritas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir.

Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinieritas dapat juga digunakan cara regresi parsial, yaitu sebagai berikut :

Regresikan; $Y = f(X_1, X_2)$; sebagai model awal, tentukan nilai R^2 , kemudian regresikan antara sesama variabel bebas:

$X_1 = f(X_2)$; variabel X_1 sebagai variabel tidak bebas, tentukan R_1^2

$X_2 = f(X_1)$; variabel X_2 sebagai variabel tidak bebas, tentukan R_2^2

Bandungkan nilai R^2 dengan R_1^2 , R_2^2 , jika ada di antara R_1^2 dan R_2^2 yang nilainya lebih besar dari R^2 , maka dalam model regresi awal terjadi multikolinieritas.

3.5.2 Uji Autokolerasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lain, atau variabel gangguan tidak random. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai Uji Durbin Watson Test dengan rumus sebagai berikut:

$$d_{hit} = \frac{\sum(e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}$$

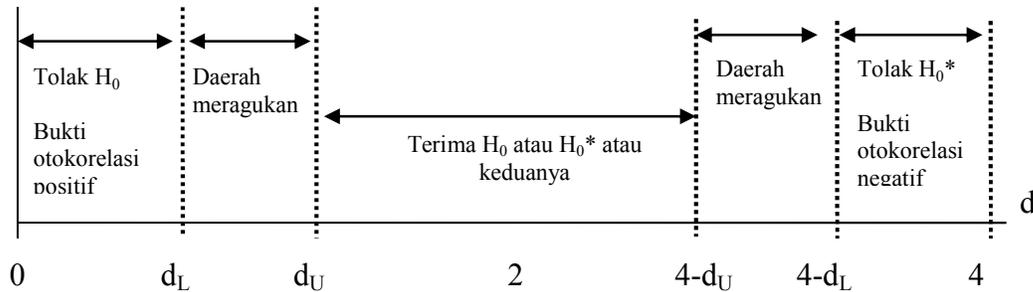
Adapun hipotesisnya, sebagai berikut :

$H_0 : \rho = 0$, artinya tidak ada autokorelasi

$H_1 : \rho \neq 0$, artinya ada autokorelasi

Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α .

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Statistik d Durbin-Watson

Di mana :

- H_0 : tidak ada autokorelasi
- $0 < d < d_L$: tolak H_0 (ada korelasi positif)
- $4 - d_L < d < 4$: tolak H_0 (ada korelasi negatif)
- $d_U < d < 4 - d_U$: terima H_0 (tidak ada autokorelasi)
- $d_L \leq d \leq d_U$: pengujian tidak dapat disimpulkan
- $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$: pengujian tidak dapat disimpulkan

3.5.3 Uji Run

Uji Run sebagai bagian dari *statistic non parametric* dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residu terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residu tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat acak atau random.

Hipotesis : H_0 : galat (res_1) random (acak)

H_1 : galat (res_1) tidak random (tidak acak)

3.6 Defenisi Operasional

1. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Data yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam persen (%).
2. Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan terutama untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Tenaga kerja adalah jumlah penduduk usai kerja (berusia 10 tahun ke atas) yang bekerja, yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang/jasa secara kontinu paling sedikit satu jam dalam seminggu. Tenaga Kerja dinyatakan dalam persen (%).